

MENELUSURI TINDAK KEKERASAN DI TANAH AIR

Turtiantoro *)

Abstract

History of Indonesian nation up to now notes various grieves, misery and social difference, which caused by unjust behavior and discrimination on the basis of ethnic, race, skin colour, culture, language, religion, faction, gender, and other social status. Unjust behavior and discrimination is human right collision.

Key words : conflict, hardness, unjust.

A. Pendahuluan

Pada kenyataannya, selama lebih lima puluh tahun usia Republik Indonesia, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, atau penegakkan hak asasi manusia masih jauh dari memuaskan. Hal tersebut tercermin dari kejadian berupa penangkapan yang tidak sah, penculikan, penganiayaan, perkosaan, penghilangan paksa, bahkan pembunuhan, pembakaran rumah tinggal dan tempat ibadah, penyerangan pemuka agama beserta keluarganya. Selain itu terjadi pula penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik, dan aparat negara yang seharusnya menjadi penegak hukum, pemelihara keamanan, dan pelindung rakyat, tetapi justru mengintimidasi, menganiaya, menghilangkan paksa dan/atau menghilangkan nyawa. Uraian singkat tersebut di atas bukannya tanpa dasar karena berpijak dari bagian penjelasan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menarik untuk dikritisi karena di bagian penjelasan menggunakan kata *sejarah* dan kata *kenyataan* berarti sebagai pengakuan tentang peristiwa yang pernah terjadi. Tulisan ini bermaksud menjelaskan dengan tinjauan teoretis dan historis tentang tindak kekerasan berpijak dari buku Erich Fromm : "*Akar Kekerasan : Analisis Sosio-Psikologis atas Watak Manusi*". Sudah tentu didukung oleh referensi lain yang relevan seputar sejarah politik dan kekerasan yang terjadi di bumi Indonesia baik yang dilakukan oleh negara maupun masyarakat.

Analisis Sosio-Psikologis : Erich Fromm

Agresi binatang, terutama antar primata, dimulai dengan membedakan antara perilaku mereka ketika hidup dalam habitat asli dan kondisi terkekang, terutama di kebun binatang. Dari pengamatan diketahui bahwa primata di alam bebas memperlihatkan hanya sedikit agresi, sedangkan di kebun binatang memperlihatkan tingkat

kedestruktifan yang berlebihan. Pembedaan itu menurut Erick Fromm sangat penting untuk memahami agresi manusia karena selama ini, di sepanjang sejarahnya, hampir tidak pernah hidup di dalam "habitat alami"-nya, kecuali suku-suku pemburu dan pengumpul makanan serta manusia agraris pertama yang hidup 5000 tahun SM. Penelitian terhadap jenis kera baboon yang dilakukan Solly Zuckermann tahun 1929-1930 di kebun binatang London Regent Park dalam ruang 100 x 60 kaki, cukup luas untuk ukuran kebun binatang namun terlalu sempit jika dibandingkan dengan habitat alami mereka. Zuckermann mengamati sejumlah besar ketegangan dan agresi di kalangan binatang ini. Menurut Zuckermann sebagaimana dikutip Erick, yang kuat dengan kejam menindas yang lemah, dan bahkan para induk binatang tidak segan-segan merebut makanan dari tangan anak-anak mereka. Korban utama agresi mereka adalah betina dan anak-anak yang adakalanya terbunuh atau terluka selama terjadi perkelahian massal. Observasi lain terhadap perilaku primata di kebun binatang dilakukan di Zurich (Swiss) oleh Hans Kummer (1951), dia menangkarkan primata jenis Baboon dalam sebuah tanah berpagar seluas 15 x 27 yard. Hasilnya, gigitan serius yang menyebabkan luka parah adalah hal biasa. Kummer sebagaimana dikutip Erick, melakukan perbandingan rinci atas agresi di kalangan binatang yang tinggal di kebun binatang Zurich dengan yang tinggal di alam bebas, yang ia teliti di Ethiopia. Ia berpendapat bahwa insiden tindakan agresif di kebun binatang adalah sembilan kali lebih sering terjadi terhadap betina dan tujuh belas setengah kali terjadi pada jantan dewasa jika dibandingkan dengan yang terjadi di alam bebas. Yang cukup menarik dalam hal pengaruh kondisi ekologi terhadap agresi adalah rekaman hasil beberapa penelitian lain yang dirangkum Erick mengenai kera *rhesus* (*Macaca Mulata*), terutama

yang dilakukan oleh C.H. Southwick (1964), juga C.H. Southwick, M. Beg, M. Siddiqi (1965). Southwick mendapati bahwa kondisi lingkungan sosial selalu menimbulkan pengaruh besar terhadap bentuk dan frekuensi perilaku agonistik pada kera-kera rhesus yang dikerangkeng. Penelitiannya memungkinkan perbedaan antara perubahan-perubahan lingkungan, dalam hal jumlah binatang di ruangan yang tersedia, dan perubahan-perubahan sosial, yakni dimasukkannya binatang asing biasanya lebih menimbulkan agresi dibanding dengan keberjejalan itu sendiri. Disimpulkan bahwa makin sesak ruangan mengakibatkan peningkatan agresi, akan tetapi perubahan struktur sosial dengan dimasukkannya binatang baru justru "menimbulkan peningkatan interaksi agresif yang lebih dramatis dibanding dengan yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan", Erick kemudian mengajukan pertanyaan : "apakah kondisi yang sama juga merupakan sumber penting bagi timbulnya agresi pada manusia?". Manusia membutuhkan sistem sosial dimana ia memiliki tempat tinggal dan hubungan dengan sesamanya relatif stabil serta didukung dengan nilai-nilai dan gagasan yang diterima secara umum. Dalam kehidupan masyarakat industri, tradisi, nilai-nilai sosial, dan keterikatan sosial dengan sesama meluntur atau bahkan menghilang. Masyarakat moderen cenderung merasa terisolir dan kesepian, sedangkan yang dia peroleh dari media komunikasi hanyalah slogan dan ideologi. Dia telah menjadi sebuah atom (padan kata Yunani untuk "in-dividual" = tidak dapat dibagi), yang menyatu hanya karena kepentingan sosial dan ekonomi, meski terkadang juga merupakan kepentingan yang bertentangan. Lain halnya yang terjadi di Belgia dan Belanda sebagaimana dikatakan Erick Fromm, bahwa sebagai dua dari beberapa negara yang paling padat penduduknya, namun tidak memperlihatkan ciri agresifitas tertentu. Contoh lain adalah di Manhattan Island yang kota besar merupakan salah satu tempat berpenduduk terpadat di dunia, tidak ada tanda-tanda kekerasan yang berlebihan. Menurut Erick contoh-contoh tadi menunjukkan bahwa yang memiliki andil terhadap timbulnya agresi bukan hanya keberjejalan, melainkan kondisi sosial, psikologis, budaya dan ekonomi. Penduduk yang berlebihan, yakni kepadatan penduduk dalam kondisi miskin, menyebabkan stres dan agresi, sebagai contohnya adalah kota-kota besar di India, seperti juga kawasan kumuh di kota-kota besar di Amerika. Kelebihan berarti jumlah orang dalam masyarakat tertentu melebihi kemampuan ekonomi untuk

menyediakan pangan, perumahan, dan hiburan yang memadai, memiliki dampak buruk. Akan tetapi dalam masyarakat yang landasan ekonominya cukup kuat untuk menyangga jumlah penduduk yang padat, kepadatan itu sendiri tidak akan mengurangi privasi para warganya, mereka tidak akan rentan terhadap penyusupan penduduk lain. Pelenyapan manusia mencapai puncaknya terutama terhadap musuh berlainan warna kulit. Dalam perang Vietnam menunjukkan bahwa tentara Amerika kurang memiliki rasa empati terhadap orang Vietnam yang mereka musuhi. Bahkan kata pembunuhan dihaluskan menjadi "pembersihan". Dalam bantahannya di pengadilan, Letnan Calley – yang didakwa membunuh sejumlah rakyat sipil di Vietnam terdiri dari pria, wanita, dan anak-anak, di My Lai – mengatakan bahwa dirinya tidak pernah diajari untuk memandang tentara Vietcong sebagai manusia, namun sebagai musuh. Perkara bantahan itu memadai atau tidak, bukan persoalan penting disini. Namun dalihnya itu tentunya cukup mendasar, lantaran memang benar demikian dan dia uraikan dalam kata-kata yang menggarisbawahi sikapnya terhadap Vietnam Utara. Calley (dalam buku lain bernama Bob Kerrey) dalam wawancara dengan *The Wallstreet Journal* dan *Omaha Word Herald* pada April 2001 menyatakan pengakuannya atas perbuatan tentara AS di Vietnam. Letnan Cerrey (tahun 1969 berusia 25 th). Pada mulanya ia mengaku ditembaki. Atas perintahnya pasukan AS membalas, hasilnya 21 Vietcong terbunuh seperti yang tercantum dalam surat pujian yang menyertai bintang tertinggi ke empat Bronze Star untuk keberaniannya (Harsutejo, 2003 :hal 363). Menurut tajuk Kompas 30 April 2001, sebaiknya pengalaman semacam itu dan yang serupa ditebus dengan sikap ksatria seperti lazimnya diajarkan pendidikan militer (Harsutejo, 2003 : hal 364). Dalam sejarah di Indonesia sikap ksatria belum bisa diharap banyak, bahkan untuk sebagian peristiwa kekerasan menjadi paradoksal. Tan Malaka dan beberapa teman/pengawalnya yang dieksekusi militer 19 Februari 1949 di pinggir kali Brantas, jasadnya tak pernah ditemukan. Soekarno melalui Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1963 ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional (Hery, 2007 : hal 200). Logikanya si eksekutor adalah pelaku kejahatan, namun faktanya tidak demikian, karena patung salah seorang pelaku eksekusi sampai kini berdiri gagah di Kota Surabaya dengan seragam kebesarannya. Menurut Erick Fromm, cara lain untuk menjadikan pihak musuh dianggap sebagai "bukan manusia" adalah dengan memutus ikatan perasaan dengan mereka. Cara ini

biasa menjadi semacam kondisi pikiran yang menetap, apakah yang menjadi sasaran agresi adalah orang asing, kerabat dekat, atau sahabat, tidak ada bedanya, lantaran yang terjadi adalah bahwa si agresor memutuskan hubungan emosi dengan orang lain sekaligus bersikap “dingin” terhadapnya. Cukup menarik perhatian bahwa Erick memberi perhatian khusus dengan mengambil contoh kedestruktifan yang pernah terjadi di India dan Indonesia. Kedestruktifan dalam struktur karakter, berupa karakter sadistik (kejam) dan nekrofilik (cinta kematian). Keduanya mempunyai alasan pemicu. *Pertama*, selalu ada kondisi luar yang menstimulir keduanya, misalnya perang, konflik keagamaan atau politik, kemiskinan, kejenuhan yang amat sangat, pelecehan individu. *Kedua*, bersifat subyektif, berupa narsisme (kekaguman pada diri sendiri) termasuk kekaguman pada kelompoknya dalam konteks kebangsaan maupun keagamaan. Erick Fromm nampaknya tertarik untuk mengamati India dan Indonesia sebab ada kemiripan satu sama lain yaitu kedestruktifan disertai kondisi *trance* (keadaan setengah sadar/kesurupan). Dari wawancara penulis dengan saksi mata konflik di Sampit Kalimantan Tengah beberapa tahun yang lalu dan diulangi di minggu pertama Desember 2007 semakin ada petunjuk kuat dan selaras dengan perhatian Erick bahwa pelaku kekerasan memperlihatkan kondisi *trance*. Sifat dan bentuk kedestruktifan lain yang diungkap Erick Fromm yaitu kedestruktifan kesumat, juga diistilahkan sebagai sifat “haus dendam”, baik secara individu maupun kelompok. Banyak orang Jerman di masa lampau yang termotivasi oleh keinginan untuk membalas dendam karena kekalahan perang tahun 1914 – 1918 (Perang Dunia ke I) atau lebih khusus karena tidak adilnya perjanjian damai Versailles dalam hal syarat-syarat materialnya terutama tuntutan agar pemerintah Jerman bertanggungjawab penuh atas terjadinya perang itu. Selain pembatasan militer, Jerman juga harus membayar ganti rugi kepada negara-negara Sekutu pemenang perang yang jumlahnya sangat besar (P.K.Ojong, 2003 : hal xxvii). Mengapa dan bagaimana penjelasannya ketika banyak terjadi kekerasan di awal kemerdekaan Indonesia dan hal itu terus terjadi dalam kurun waktu panjang sesudahnya, belum banyak yang mengungkap secara sosio – psikologis.

B. Pembahasan

Kekerasan di era Perang Kemerdekaan.

Beberapa tahun lalu istilah kekerasan terangkat populer dan menjadi perhatian secara luas antara lain dipicu buku yang ditulis seorang artis Rieke Diah Pitaloka berjudul “*Kekerasan Negara Menular Ke Masyarakat*” dari tesisnya untuk meraih gelar magister Ilmu Filsafat di Universitas Indonesia. Rieke menjelaskan bahwa di Indonesia terdapat keterkaitan antara kekuasaan dan kekerasan. Kekerasan yang dilakukan masyarakat bukan sebagai hal yang otonom, namun terkait dengan kekuasaan. Kondisi seperti ini menggiring masyarakat untuk memahami kejahatan sebagai hal yang biasa. Pemahaman tersebut timbul akibat masyarakat terkondisi untuk “malas berpikir” dan dibiasakan untuk tidak kritis. Masyarakat “dibungkam” oleh penguasa yang tidak menginginkan kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang mereka buat. Lama kelamaan masyarakat menjadi manusia yang patuh dalam arti pasif, mereka menerima bahkan menjalankan perintah dari penguasa tanpa melakukan pengujian dalam dirinya. Rieke berusaha menganalisis gagasan pemikiran Hannah Arendt yang mencoba menggali relasi antara kekuasaan dan kekerasan serta membongkar akar permasalahan kebersediaan masyarakat terlibat tindak kekerasan, yang oleh Arendt disebut sebagai *banality of evil* (Rieke Diah Pitaloka, 2004 : hal X-XV). Meski kajian Rieke tentang kekerasan banyak memberi perhatian dengan menyoroti sejak awal tampilnya rejim Orde Baru, namun bukan berarti bahwa era sebelumnya tidak pernah bersih dari kekerasan. Awal kemerdekaan diliputi ketidakpastian. Kevakuman kekuasaan di tahun 1945 telah dimanfaatkan Soekarno, Hatta dan kaum pergerakan lainnya untuk mendirikan negara. Proklamasi kemerdekaan adalah satu masalah, tetapi prakteknya merupakan masalah lain. Soekarno dan para pembantunya menyadari hal ini sepenuhnya (Heijboer, 1998 : hal 15), karena sejak itu ke depan untuk beberapa waktu ada ketidakpastian. Walaupun diliputi ketidakpastian justru mampu mendorong semangat perlawanan rakyat kepada siapapun yang dianggap memusuhi atau tidak mendukung kemerdekaan, dan inilah pangkal terjadinya komplikasi masalah. Para pihak yang merasa terancam kepentingannya karena proklamasi kemerdekaan juga tidak tinggal diam, melakukan perlawanan. Sejak awal kemerdekaan kekerasan dan bahkan penghilangan nyawa secara paksa sudah terjadi. Di penghujung tahun 1945 tepatnya tanggal 20 Desember sejarah mencatat bahwa tokoh pergerakan, penggagas pekik “merdeka”, Otto Iskandardinata dibunuh di pantai Mauk, Tangerang

oleh anggota laskar hitam seorang diantaranya bernama Mujibata dengan tuduhan sebagai penghianat bangsa. Sekitar jam 8.30 Mujibata dan kawan-kawan menggelandang Otto Iskandardinata ke pantai laut Ketapang. Sebelum dieksekusi Otista masih sempat mengingatkan : “Nak, saya jangan dimatikan, saya orang baik”. Akan tetapi para eksekutor sudah diselubung amarah revolusi dan berteriak : “Mata-mata musuh yang menjual kota Bandung satu miliun”, dan berlangsunglah peristiwa dramatis revolusi memakan anak terbaiknya (Yahya, 2004 : hal 122-124). Peristiwa Tiga Daerah misalnya, lebih daripada sekedar protes sosial terhadap eksploitasi Belanda. Selain latar belakang politik dan ekonomi, revolusi sosial di Tiga Daerah pada tahun 1945 juga harus disoroti kepemimpinannya atau ideologinya dan konteks kebudayaannya – apa artinya revolusi bagi pelakunya sendiri (Lucas, 1989 : hal 3). Kedatangan tentara sekutu sesungguhnya bukan untuk mematahkan kemerdekaan. Instruksi dari Panglima Komando Asia Tenggara, Laksamana Lord Louis Mountbatten kepada Laksamana Muda Sir Wifred R. Patterson yang mendarat di Jakarta 15 September 1945 jelas, melucuti senjata tentara Jepang yang kalah perang untuk menyelenggarakan repatriasi, dan mengurus penyelesaian dan melindungi para bekas tawanan perang dan interniran dan mengembalikan mereka ke negaranya masing-masing. Untuk itu ia membawa serta satuan RAPWI (*Rehabilitation of Allied Prisoners of War and Internees*) yang bertugas memulangkan para tawanan perang dan interniran Sekutu dari kamp-kamp tawanan Jepang di Pulau Jawa. Bagi Indonesia yang pada bulan Oktober 1945 mulai membentuk tentara (TRI) tidaklah sulit, namun memperoleh senjata Jepang yang kalah perang menjadi masalah hidup dan mati. Di seluruh Jawa dan Sumatera tentara Jepang langsung menghadapi gerombolan orang-orang Indonesia yang kalap tetapi dengan persenjataan yang jelek (Heijboer, 1998 : hal 18). Di Sukabumi misalnya, komandan garnisun tentara Jepang menyerahkan senapan, senapan mesin, dan peluru kepada pasukan Hizbullah. Di Banyumas tentara Jepang menyerahkan perlengkapan dan persenjataan kepada Devisi-4 TRI hingga kesatuan ini persenjataannya paling lengkap dari tentara Indonesia, dan faktor keberhasilan inilah yang kemudian menjadikan Soedirman menjadi pimpinan militer yang menonjol. Di Jogjakarta para pejuang harus bertarung dengan prajurit Jepang selama dua belas jam sebelum mendapatkan persenjataan. Di Semarang pertempuran antara para pejuang republik

dengan Jepang begitu kejam dan berdarah (korban tewas sekitar 2000 orang). Pada bulan-bulan akhir 1945, Jakarta, Semarang, Surabaya, Palembang, Padang, Medan diduduki oleh sebagian besar tentara India pasukan Sekutu. Persoalan menjadi lain ketika pasukan Inggris hendak memperluas tumpuan kakinya dengan sasaran utama pembebasan penghuni kamp-kamp interniran di berbagai tempat antara lain di Jakarta, Surabaya, Semarang (di Halmahera dan Gedangan), Ambarawa, dan Magelang. Jumlah tawanan cukup banyak yaitu 2490 orang Inggris, 105.043 orang Belanda, dan 1476 orang campuran Amerika, Jerman, dan Denmark. Agresi orang-orang Indonesia pada hakikatnya tidak ditujukan pada tentara India/Sekutu tetapi terhadap orang-orang Belanda yang datang bersama orang-orang Inggris dalam rangka RAWPI. Ini adalah organisasi yang dibentuk guna menyelamatkan para interniran Belanda dari posisi terjepit karena sebagai tawanan Jepang, sedangkan Jepang sendiri sudah kalah, sementara itu telah berdiri Republik Indonesia. Orang-orang RAWPI dianggap oleh orang-orang Indonesia sebagai mata-mata yang menyelidiki medan bagi pasukan Belanda (NICA dan KNIL). Dalam perkembangannya dendam kesumat kalangan pejuang semakin meluas tidak hanya menempatkan RAWPI, NICA dan KNIL sebagai musuh namun juga kalangan interniran menjadi sasaran. Di Ambarawa ada sekelompok pejuang yang menerobos masuk kamp interniran Belanda, mengumpulkan beberapa wanita dan anak-anak kemudian dilempari dengan granat. Di Depok, dekat Jakarta, penghuni kamp interniran dikumpulkan menjelang kedatangan tentara sekutu, sebagian besar dihabisi nyawanya. Sekitar Surabaya sebuah iring-iringan truk yang mengangkut sekitar 100 orang wanita dan anak-anak dicegat, lalu kendaraannya dibakar dan orang-orangnya dibunuh (Heijboer, 1998 : hal 23). Disamping itu yang juga terjepit adalah orang-orang Tionghoa karena diantara mereka sering didapati tidak patriotik. Memang ada sekelompok orang Tionghoa di Jakarta dan Banten yang masuk menjadi tentara NICA tetapi jumlahnya sangat kecil (Setiono, 2002 : hal 577). Belanda yang bermaksud untuk kembali di Indonesia, juga seperti militer Jepang, sampai tingkat tertentu memerlukan kerjasama dengan orang-orang Tionghoa. Pada awal Maret 1946 pihak penguasa Belanda mulai merekrut orang-orang Tionghoa untuk dijadikan Polisi Militer dan pasukan cadangan (Setiono, 2002 hal : 578). Kutipan majalah *Star Weekly* edisi No.12, 14 Maret 1946 yang

dimuat dalam buku Beny G. Setiono, "Tionghoa Dalam Pusaran Politik" sebagai berikut : *Kita dengar diwaktoe paling belakangan ini banjak orang Tionghoa masoek Nica, ada jang seboet djoemlah 100, ada djoega jang seboet joemlah beberapa kali lebih besar. Mereka ini berasal dari Kebajoeran, bilangan Banten dan lain-lain tempat jang tidak termasoek kota Djakarta. Banyak diantaranya telah dibakar roemahnya, atau telah diboenoeh ajahnya, iboenja ataoe istrinja. Djadi mereka masoek Nica karena boeat membalas sakit hati. Ada lagi lain-lain orang menjadi serdadoe, karena terlaloe miskin tidak mempoenjai pentjarian. Perboeatan dari Nica Tionghoa ini ada bertentangan dengan sikap dari bangsa Tionghoa dalam keroewetan politiek dalam negeri ini. Dan dengan bertindak sendiri-sendiri, mereka bisa terbitkan salah mengerti dan membahajakan djiwanya banyak orang Tionghoa jang tinggal di oedikan.* (Setiono, 2002 : hal 580).
 Sungguh menarik untuk diketahui bahwa Pierre Heijboer dalam buku "Agresi Militer Belanda : memperebutkan Pending Zamrud Sepanjang Khatulistiwa 1945/1949", di halaman 26 memuat foto dan keterangan bahwa di daerah yang sering terjadi pertempuran (rata-rata terjadi di sekitar dari seluruh garis demarkasi) penduduk biasanya mengungsi. Orang Indonesia masuk ke wilayah Republik, orang Tionghoa masuk ke wilayah pendudukan Belanda. Akibat terjadinya berbagai kekacauan yang banyak menimbulkan banyak penderitaan etnis Tionghoa sebagai eksekusi aksi militer Belanda, sebagai hasil pembicaraan antara Sutan Syahrir dan Oey Kim Sen dibentuk Poa An Tui (Barisan Polisi Kota). Pembentukan Poa An Tui bertujuan untuk melindungi etnis Tionghoa dari penjarahan, pembakaran, dan pembunuhan. Awalnya dipicu oleh terjadinya kerusuhan rasial Tangerang yang terjadi minggu-minggu awal Juni 1946, menyebar ke beberapa daerah. Kerusuhan anti Tionghoa yang terbesar semenjak Indonesia merdeka ini berawal dari adanya tuduhan sepihak bahwa orang-orang keturunan Tionghoa sebelumnya pro pada Belanda dan dicurigai agen NICA. Boleh jadi ada oknum perorangan yang memihak NICA, baik keturunan Tionghoa maupun orang Indonesia asli, tetapi dalam desas-desus itu dipukul rata, digeneralisir. Diduga ribuan orang tewas terbakar hangus bersama rumah-rumah mereka, lainnya mati terbunuh. Banyak diantara remaja pria yang disunat kemaluannya secara paksa, kaum perempuan dijagal kehormatannya (Oei, 1995 : hal 65-66). Dapat dipastikan bahwa Poa

An Tui di Jakarta tidak pernah berkolaborasi dengan Belanda, justru mereka sangat anti Belanda, di Surabaya mereka berjuang bahu-membahu. Boleh jadi ada oknum-oknum Poa An Tui di daerah tertentu yang pro-Nica, sehingga di beberapa daerah pembentukan Poa An Tui justru menimbulkan benturan antara warga keturunan Tionghoa dengan pasukan-pasukan tidak berinduk atau laskar-laskar liar (Setiono, 1998 : hal 627). Pada sisi lain, republik proklamasi yang berusia masih sangat muda dihadapkan pada dilema ketika para tokoh yang terlibat peristiwa Madiun dapat ditangkap. Pada tanggal 27 November 1948, Djoko Soejono, Maroeto Darusman, sarjono, dan Sajogo ditangkap di Penawangan dan Godong (sekarang Kecamatan Godong dan kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan). Tanggal 29 November 1948 Amir Sjarifoeddin, Harjono, dan Soeripno tertangkap di Gua Macan Desa Penganten Kecamatan Klambu Grobogan. Dalam sidang kabinet tanggal 8 Desember 1948 dibicarakan tindakan yang akan diambil terhadap Amir Sjarifoeddin dan kawan-kawan jika Belanda melakukan agresi militernya. Hadir pada waktu itu 12 orang menteri, empat orang diantaranya menghendaki agar mereka ditembak mati, empat orang lainnya mengusulkan agar tidak ditembak mati dan dibebaskan, sedangkan empat orang lainnya abstain. Kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan vetonya, menegaskan bahwa mereka tidak boleh ditembak mati. Namun tanggal 19 Desember 1948 tengah malam ketika Belanda mulai melancarkan agresi militernya yang kedua, di Desa Ngalijan yang terletak di Kelurahan Lalung, Kabupaten Karanganyar, Karesidenan Surakarta, berdasarkan Surat Perintah Gubernur Militer Kolonel Gatot Soebroto, dilakukan eksekusi terhadap orang-orang tersebut di atas. Sebelum ditembak mereka sempat menyanyikan lagu Indonesia Raya dan "Internasionale", sedangkan Amir Sjarifoeddin ditembak sambil mendekap kitab injil yang kemana-mana selalu dibawanya (Setiono, 2003 : hal 658). Bila resiko yang harus dihadapi beberapa aktor peristiwa Madiun 1948 harus berhadapan dengan regu tembak tanpa pengadilan, maka nasib Kutil (nama asli Sakhjani), aktor peristiwa Tiga Daerah berakhir sama tapi jalannya berbeda. Tahun 1946 Hakim Soeprapto – yang kemudian menjadi Jaksa Agung - memutus hukuman mati, namun urung dieksekusi akibat agresi militer Belanda pada bulan Juli 1947. Hakim Soeprapto harus mengungsi berjalan kaki bersama keluarga termasuk si terpidana mati Kutil. Ketika Santoso, anak sang hakim Soeprapto terpeleset jatuh ke

jurang namun selamat, digunakan kesempatan oleh Kutil melarikan diri, kembali ke profesinya sebagai tukang cukur di Jl Kebun Kacang Gang II Jakarta (Yahya, 2004 : hal 223). Tahun 1949 Kutil dikenali orang Slawi, dan kemudian ditahan polisi Belanda (Jakarta waktu itu dikuasai Belanda). Pada penyerahan kedaulatan bulan Februari 1950, Kutil ikut diserahkan kepada Polisi Republik Indonesia, dikirim kembali ke Pekalongan. Menolak matanya ditutup, Kutil menghadapi regu tembak di dekat pantai Pekalongan tanggal 5 Mei 1951 (Lucas, 1989 : hal 291).

C. Penutup

Kekerasan yang terjadi pada era perang kemerdekaan (1945-1949) dengan korban dari banyak pihak (Indonesia, keturunan Tionghoa, Belanda, Inggris, Jerman, Amerika), dan tentara Jepang yang sudah kalah perang memperlihatkan fenomena bercampurnya kekerasan karena perang (militer) dan konflik sipil serta begitu mudahnya orang terpelanting dari posisi pahlawan menjadi penjahat atau sebaliknya. Konflik dan kekerasan berdarah tahun 1948 dikenal sebagai peristiwa Madiun perlu menjadi catatan tersendiri tidak hanya karena terjadi di era perang kemerdekaan, namun juga dari segi jumlah korban yang sampai kini sulit dipastikan namun diperkirakan sedikitnya 8000 orang tewas (Setiono, 1998 : hal 658). Meredanya konflik dan kekerasan di tahun 1950 setelah sebelumnya dicapai kesepakatan antara Indonesia dengan Belanda melalui Konferensi Meja Bundar, merupakan lembaran baru dalam perjalanan republik proklamasi. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang mendasari NKRI dirumuskan oleh Panitia Bersama yang dibentuk Badan Pekerja KNIP dan pimpinan DPR-RIS berhasil mengakomodasi seluruh jiwa proklamasi 17 Agustus 1945 yang esensial dan mengambil oper seluruh *Universal Declaration of Human Rights PBB*. Sejarah kemudian mencatat bahwa era UUDS 1950 yang secara gamblang memuat seluruh isi deklarasi HAM PBB bukan berarti Indonesia masa itu reda dari kekerasan dan pembunuhan. Sejak awal tahun 1950, tanda-tanda konflik politik sudah nampak dan semakin memanas hingga beruntun timbul pemberontakan DI-TII, RMS, PRRI/Permesta, serta pergolakan lainnya. Berlakunya kembali UUD 1945 di tahun 1959 tidak menyurutkan ketegangan politik dan puncaknya meledak dalam tragedi 1965. Sudah tentu perjalanan sejarah bangsa Indonesia sejak proklamasi yang banyak diliputi kekerasan tidak akan

mampu dimuat hanya dalam satu tulisan singkat. Tulisan ini merupakan usaha kecil untuk menjawab pertanyaan besar tentang agresi manusia.

Daftar Pustaka

- Adam Aswi Warman, *Soeharto File : Sisi Gelap Sejarah Indonesia*. Yogyakarta, Ombak; 2006. Anderson Charles David, *Peristiwa Madiun 1948 : Kudeta atau Konflik Iternal Tentara ?*. Yogyakarta, Medio Pressindo; 2003.
- Fromm Erick, *Akar Kekerasan, Analisis Sosio-Psikologis atas Watak Manusia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar; 2001.
- Harsutejo, *G30S : Sejarah Yang Digelapkan*, Jakarta, Hasa Mitra; 2003.
- Heijboer Pierre, *Agresi Militer Belanda, Jakarta, Grasiondo*; 1998. Hery Yuniur Hafidh, *Tan Malaka Dibunuh*, Yogyakarta, Resist Book; 2007.
- Iip D. Yahya, *Mengadili Menteri, Memeriksa Perwira: Jaksa Agung Soeprapto, dan Penegakkan Hukum di Indonesia Periode 1950-1959*, Jakarta Gramedia Pustaka Utama; 2004.
- Jarot Eros, *Detak File : Siapa Sebenarnya Soeharto, Fakta dan Kesaksian Para pelaku Sejarah G-30-S/PKI*, Jakarta, Media Kita; 2006.
- Lucas Anton E, *Peristiwa Tiga Daerah, Revolusi dalam Revolusi*. Jakarta, Frafiti Pers; 1989.
- Oe TjoeTat, *Pembantu Presiden Soekarno* (memoar), Jakarta, Hasa Mitra; 1995.
- Ojong PK, *Perang Eropah*, Jakarta, Penerbit Kompas; 2003
- Pitaloka Rieke Diah, *Kekerasan Negara Menular Ke Masyarakat*, Galang Press, Yogyakarta, 2004.
- Setiono Beny G, *Tionghoa Dalam Pusaran Politik*. Jakarta, Elkasa; 2000.
- Sulistyo Hermawan, *Palu Arit di Ladang Tebu*, Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia; 2000. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Jakarta, Sinar Grafika; 2000.